PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Kerja Perubahan
(RENJA PERUBAHAN)
TAHUN 2024

KABUPATEN BARRU
TAHUN 2024

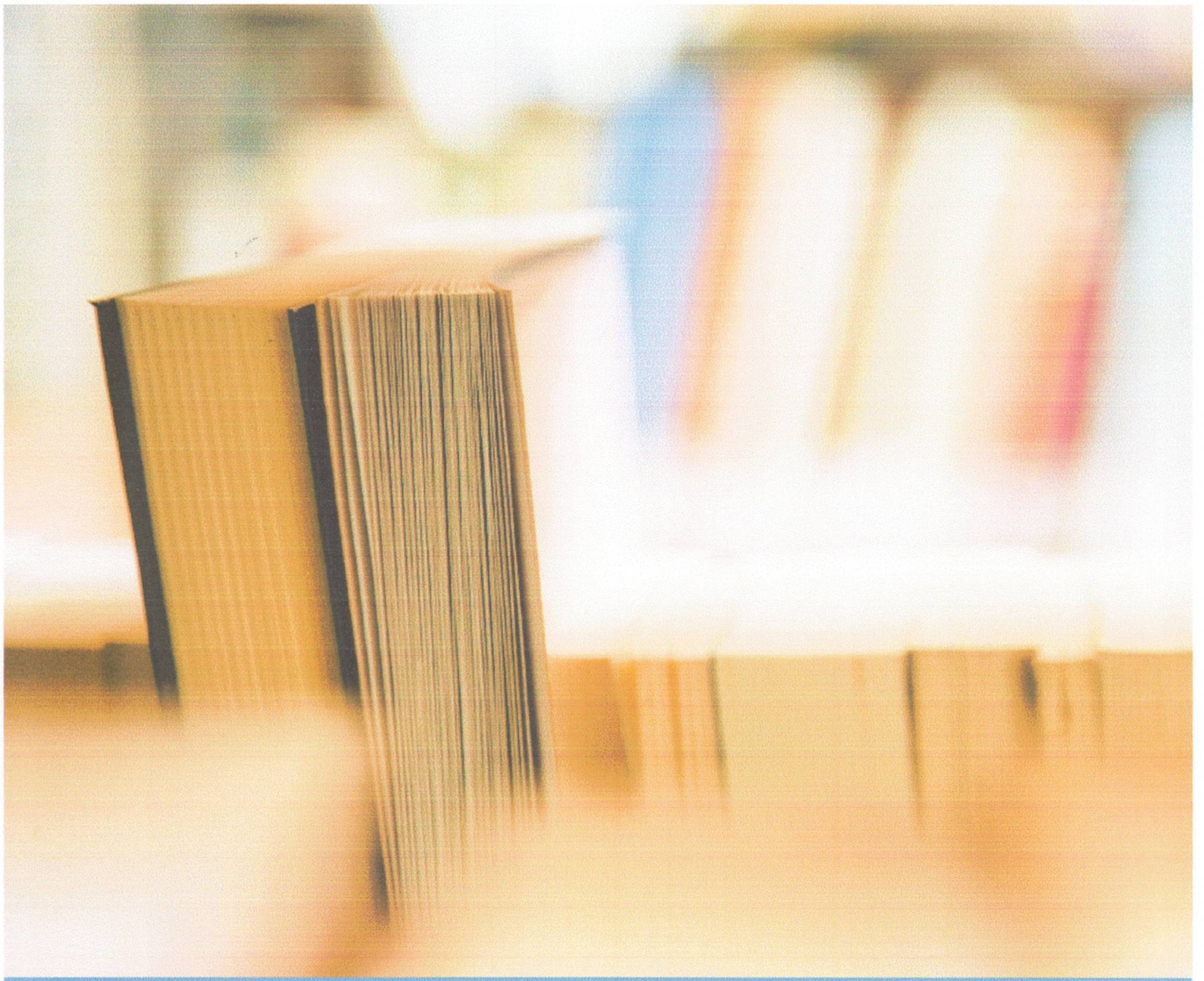

RENJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BARRU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru dapat berjalan dengan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru dan stakeholder.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita dengan nilai ibadah. Amin.

Barru, Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Barru

SYAMSIR, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197001011990031012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Landasan Hukum 5

3. Maksud dan Tujuan 9

4. Sistematika Penulisan 9

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

BAB.III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

BAB. IV PENUTUP 34

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.
   - Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
   - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja
   - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, yang mencakup :
   - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
   - Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

   Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

   a. Pendahuluan

b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
e. Penutup

c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

e. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

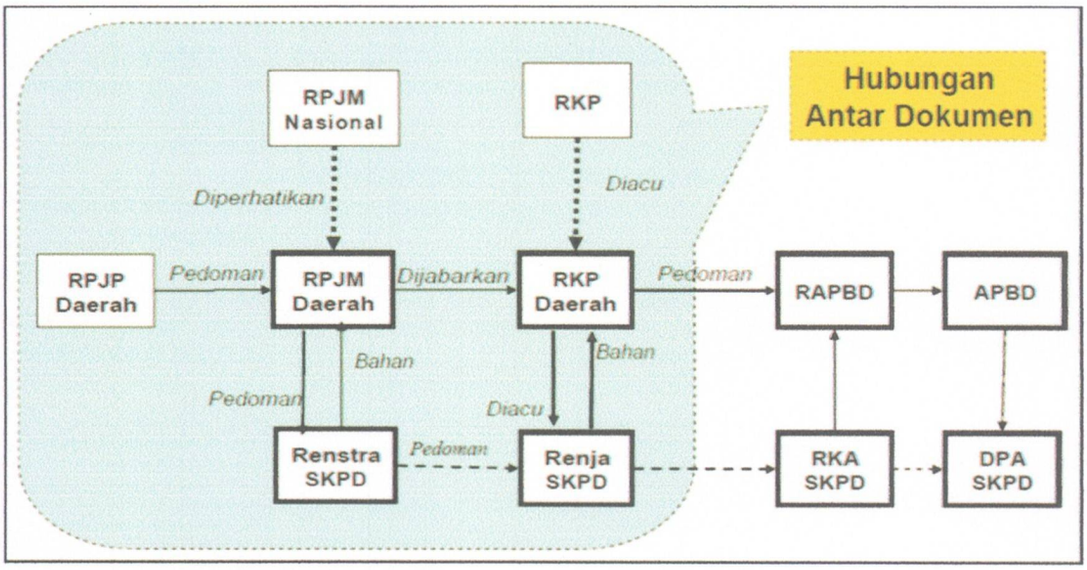

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Barru, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

Memperhatikan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, didapatkan perkembangan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, meliputi penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam Renstra periode tahun 2021-2026, perubahan kebijakan pusat, penyesuaian beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tahapan penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomnor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33;
20. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM adalah:

1. Acuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Barru tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi kabupaten.
2. Menjamin pencapaian indikator kinerja dan menyesuaikan dengan dinamika yang ada.
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (TAHUN 2024)

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021-2026 yang memuat indikator kinerja keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan. Analisa kinerja pencapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2024 dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam satuan presentase.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sampai dengan Triwulan II tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan TA 2024 yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Triwulan II 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan II TA. 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II TA. 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II TA. 2024 (%)		Unit PD Penanggu jawab
											Triwulan I		Triwulan II										
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13) = 9+10+11+12		(14) = 13/8*100		(15) = 7 + 13		(16) = 15/6*100		(16)
			Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP pada BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
		Kepegawaian																					
		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	Nilai	4	18.491.823.243	2	5.764.078.777	3	3.290.073.528	0	518.981.816	-	1.000.007.404	0,00	1.518.989.220	0%	46,17%	200%	7.283.067.997	40,00%	39,39%	
			Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	100	1.077.622.340	50,7	129.273.701	20	-	0,00	-	7,86	-	7,86	-	39%	0,00%	58,56	129.273.701	58,56%	12,00%	
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	100 %	16.307.727.773	200%	5.045.316.766	100%	3.039.589.828	25%	436.049.671	25%	947.185.554	50%	1.383.235.225	50%	45,51%	250%	6.428.551.991	50%	39,42%	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	170	16.307.727.773	57	5.045.316.766	34	3.039.589.828	29	436.049.671	28	947.185.554	28	1.383.235.225	82%	45,51%	85	6.428.551.991	50,00%	39,42%	
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	%	100 %	1.077.622.340	100%	129.273.701	100%	-	0%	-	0,00 %	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00 %	129.273.701	20,00%	12,00%	

		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdsarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	170	1.077.622.340	63	129.273.701	34	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	63	129.273.701	37,06%	12,00%	
		Administrasi umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun**	%	100 %	1.325.434.500	200%	407.733.071	100%	183.319.700	16,67%	69.994.645	25,00%	39.840.600	41,67 %	109.835.245	41,67 %	59,91%	241,67 %	517.568.316	48,33%	39,05%	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	15	33.197.000	5	4.209.000	3	640.000	1	-	0	119.400	1	119.400	33,33 %	18,66%	6	4.328.400	40,00%	13,04%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	95.125.000	4	25.442.400	3	8.277.500	1	5.300.000	-	-	1	5.300.000	33,33 %	64,03%	5	30.742.400	33,33%	32,32%	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lapora n	30	1.197.112.500	12	378.081.671	6	174.402.200	0	64.694.645	3	39.721.200	3	104.415.845	50,00 %	59,87%	15	482.497.516	50,00%	40,31%	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun**	%	100 %	205.270.000	189,20 %	172.909.000	98,30 %	-	0,00 %	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	189,20 %	172.909.000	37,84%	84,23%	
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	24	26.000.000	1	3.700.000	7	-	0	-	-	-	-	-	0%	0,00%	1	3.700.000	4,17%	14,23%	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	14	179.270.000	15	169.209.000	7	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	169.209.000	107,14 %	94,39%	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor**	%	100 %	443.247.500	200%	86.959.500	100%	39.619.000	25,00%	12.937.500	25%	6.762.000	50%	19.699.500	49,99 %	49,72%	249,99 %	106.659.000	50,00%	24,06%	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	lapora n	5	443.247.500	2	86.959.500	1	39.619.000	0	12.937.500	0	6.762.000	-	19.699.500	0,00%	49,72%	2	106.659.000	40,00%	24,06%	

		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun**	**%**	**100 %**	**210.143.470**	**20,76%**	**51.160.440**	**14,90 %**	**27.545.000**	**0,39 %**	**-**	**4,71 %**	**6.219.250**	**5,10%**	**6.219.250**	**34,21 %**	**22,58%**	**25,86%**	**57.379.690**	**25,86%**	**27,31%**	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	**unit**	**100**	**159.393.470**	**36**	**44.130.440**	**20**	**24.095.000**	**0**	**-**	**9**	**5.539.250**	**9**	**5.539.250**	**45,00 %**	**22,99%**	**45**	**49.669.690**	**45,00%**	**31,16%**	
		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	**unit**	**65**	**16.250.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**unit**	**90**	**34.500.000**	**21**	**7.030.000**	**18**	**3.450.000**	**1**	**-**	**3**	**680.000**	**4**	**680.000**	**22,22 %**	**19,71%**	**25**	**7.710.000**	**27,78%**	**22,35%**	
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas	**Program Kepegawaian Daerah**	**Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN**	**Kategori A (81-100)**	**A(81-100)**	**13.676.202.382**	**63,74**	**1.369.148.615**	**B (61-80)**	**869.143.900**	**0**	**70.913.100**	**-**	**129.072.695**	**-**	**199.985.795**	**0**	**23,01%**	**63,74**	**1.569.134.410**	**78,69%**	**11,47%**	
		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	**Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik**	**%**	**57,53%**	**7.276.906.240**	**122,25 %**	**541.965.574**	**58,97 %**	**291.105.000**	**71,02%**	**24.823.600**	**70,02%**	**48.387.773**	**70,02 %**	**73.211.373**	**118,75 %**	**25,15%**	**70,02%**	**615.176.947**	**23,58%**	**8,45%**	
		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	**dokumen**	**10**	**352.871.728**	**4**	**4.770.900**	**2**	**3.421.400**	**0**	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**	**100,00 %**	**0,00%**	**6**	**4.770.900**	**60,00%**	**1,35%**	
		Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	**dokumen**	**5**	**3.618.249.787**	**2**	**345.195.576**	**1**	**150.785.700**	**0**	**-**	**0**	**23.658.173**	**-**	**23.658.173**	**0,00%**	**15,69%**	**2**	**368.853.749**	**40,00%**	**10,19%**	

		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	5	721.820.625	2	46.190.078	1	64.588.900	0	16.601.400	0	14.076.300	-	30.677.700	0,00%	47,50%	2	76.867.778	40,00%	10,65%	
		Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	10	66.519.100	3	22.601.950	2	10.598.900	1	600.000	0	7.253.900	1	7.853.900	50,00%	74,10%	4	30.455.850	40,00%	45,79%	
		Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	5	2.225.795.000	2	97.115.570	1	44.658.700	0	4.333.200	0	1.065.000	-	5.398.200	0,00%	12,09%	2	102.513.770	40,00%	4,61%	
		Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	10	291.650.000	4	26.091.500	2	17.051.400	0	3.289.000	1	2.334.400	1	5.623.400	50,00%	32,98%	5	31.714.900	50,00%	10,87%	
		Mutasi dan promosi ASN	**Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan**	%	100 %	4.547.151.250	180,83 %	695.274.881	100%	532.165.700	97,80%	45.502.000	97,80%	63.457.822	90,00 %	108.959.822	90,00 %	20,47%	270,83 %	804.234.703	54,17%	17,69%	
		Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar aerah	dokumen	25	448.230.900	11	110.302.747	5	65.512.000	0	13.830.800	0	21.794.242	-	35.625.042	0,00%	54,38%	11	145.927.789	44,00%	32,56%	
		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaiakan pangkat ASN	dokumen	10	1.020.065.100	4	193.008.500	2	64.615.700	0	12.893.300	1	11.230.250	1	24.123.550	50,00 %	37,33%	5	217.132.050	50,00%	21,29%	
		Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	5	3.078.855.250	3	391.963.634	1	402.038.000	0	18.777.900	0	30.433.330	-	49.211.230	0,00%	12,24%	3	441.174.864	60,00%	14,33%	
		Pengembangan kompetensi ASN	**Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3**	%	100 %	875.225.000	84,57%	63.596.500	80,40 %	9.637.000	84,98%	-	85,32%	2.222.500	85,32 %	2.222.500	106,12 %	23,06%	85,32%	65.819.000	21,36%	7,52%	
		Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	280	875.225.000	70	63.596.500	56	9.637.000	6	-	5	2.222.500	11	2.222.500	19,64 %	23,06%	81	65.819.000	28,93%	7,52%	

		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	**Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik**	**%**	**100 %**	**976.919.892**	**128,15 %**	**68.311.660**	**91,12 %**	**36.236.200**	**97,80%**	**587.500**	**97,80%**	**15.004.600**	**97,80 %**	**15.592.100**	**107%**	**43,03%**	**225,95 %**	**83.903.760**	**48,38%**	**8,59%**	
		Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	**Dokumen**	**15**	**238.684.892**	**6**	**26.372.800**	**3**	**12.719.000**	**0**	**587.500**	**1**	**7.274.600**	**1**	**7.862.100**	**33,33 %**	**61,81%**	**7**	**34.234.900**	**46,7%**	**14,34%**	
		Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	**Orang**	**1030**	**374.142.000**	**226**	**18.744.360**	**206**	**11.977.100**	**0**	**-**	**-**	**1.245.000**	**-**	**1.245.000**	**0,00%**	**10,39%**	**226**	**19.989.360**	**21,9%**	**5,34%**	
		Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	**Orang**	**34**	**364.093.000**	**19**	**23.194.500**	**7**	**11.540.100**	**3**	**-**	**4**	**6.485.000**	**7**	**6.485.000**	**100,00 %**	**56,20%**	**26**	**29.679.500**	**76,47%**	**8,15%**	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun**	**%**	**100 %**	**5.389.241.250**	**23,89%**	**519.676.250**	**80%**	**69.946.000**	**13,65%**	**35.762.500**	**0,65 %**	**4.606.800**	**14,29 %**	**40.369.300**	**17,86 %**	**57,71%**	**38,18%**	**560.045.550**	**38,18%**	**10,39%**	
		Pengembangan kompetensi teknis	**Persentase penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi**	**%**	**100 %**	**25.000.000**	**0**	**-**	**100%**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	**dokumen**	**1 dokumen**	**25.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	

		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	**Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik**	**%**	**100 %**	**5.364.241.250**	**200%**	**519.676.250**	**100%**	**69.946.000**	**0**	**35.762.500**	**-**	**4.606.800**	**0%**	**40.369.300**	**0%**	**57,71%**	**200%**	**560.045.550**	**40,00%**	**10,44%**	
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan parajabatan	**lapora n**	**30**	**5.364.241.250**	**5**	**519.676.250**	**6**	**69.946.000**	**0**	**35.762.500**	**-**	**4.606.800**	**-**	**40.369.300**	**0,00%**	**57,71%**	**5**	**560.045.550**	**16,67%**	**10,44%**	
JUMLAH ANGGARAN						**38.634.889.215**		**7.782.177.343**		**4.229.163.428**		**625.657.416**		**1.133.686.899**		**1.759.344.315**		**41,60%**		**9.541.521.658**		24,70%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	**31,87%**	**36,95%**			**43,71%**	**21,70%**	
Predikat Kinerja																	sangat rendah	sangat rendah			sangat rendah	sangat rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																	**14,29%**	**31,72%**			**53,86%**	**18,31%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																	sangat rendah	sangat rendah			rendah	sangat rendah	

Berdasarakan tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan sampai dengan triwulan II 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum terdapat sub kegiatan yang telah memenuhi target
2. Terdapat sub kegiatan yang realisasi masih 0%, namun tahapan pelaksanaan sub kegiatan telah berjalan, dan pemenuhan target berupa penyusunan dokumen/laporan akan dipenuhi pada akhir pelaksanaan sub kegiatan (Bulan Desember), yaitu :
   a. Penyediaan jasa surat menyurat (1 laporan)
   b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PND dan PPPK (1 laporan)
   c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian (1 dokumen)
   d. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian (1 dokumen)
   e. Pengelolaan mutasi ASN (5 dokumen)
   f. Pengelolaan promosi ASN (1 dokumen)
   g. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, JF, kepemimpinan dan prajabatan.
3. Terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu :
   a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
   b. Pengadaan mebel
   c. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
   d. Pemeliharaan mebel
4. Implikasi yang ditimbulkan dari program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya terhadap target capaian program/kegiatan adalah mempengaruhi persentase dari capaian realisasi program/kegiatan, sehingga berdampak pada proses akhir dari target Renstra yang akan rendah dan mempengaruhi hasil peniaian evaluasi Renstra.
5. Kebijakan/Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi factor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
   b. Mengkaji kesesuaian kegiatan dengan perencanaan.

c. Mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung/penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2022 adalah:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub bagian program dan keuangan
    b. Sub bagian umum dan sumber daya manusia
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Mutasi, Promosi dan Kompetensi, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
e. Bidang Pendidikan dan Latihan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru diarahkan untuk mencapai Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan"** serta untuk mendukung Misi ke 6 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.**

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru 2021-2026 adalah : **Meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara**, dengan Sasaran **Meningkatnya kinerja pemerintahan di bidang tata kelola pelayanan ASN.** Indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada periode awal Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Kinerja Tujuan									
1	Nilai sistem merit	Nilai	113,5	300	325	327	330	335	335
2	Indeks reformasi birokrasi BKPSDM	Nilai	0	65	70	73	75	80	80
Indikator Kinerja Sasaran									
1	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	68,56	69	75	79	80	80	80
2	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	50,87	81	91	92	93	94	94

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/proyeksi kinerja capaian Renstra tahun berjalan	Catataan analisis
1	Nilai sistem Merit	325	325	Sementara penilaian
2	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	70	70	Semenetara penilaian
3	Nilai SAKIP BKPSDM	75	70,51	Hasil penilaian 2023
4	Indeks profesionalitas ASN	91	79,41	Hasil Penilaian sementara 2023

				(per-tanggal 01 Agustus 2024)

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah hasil penilaian kinerja dari Lembaga, Instansi atau unit kerja penilai, yang meliputi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk Nilai sistem Merit, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara untuk Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara untuk Indeks profesionalitas ASN dan Inspektorat Kabupaten untuk Nilai SAKIP BKPSDM.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU 2024 adalah dengan melaksanakan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penilaian sebelumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan penguatan kelembagaan pemerintahan yang memiliki aparatur yang profesional dan penataan kelembagaan yang mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru pada masa yang akan datang diharapkan memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang menjadi isu-isu penting, yaitu :

1. Percepatan transformasi digital yang berfokus pada implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital serta percepatan integrasi system e-government yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, pemetaan dan penyederhanaan struktur proses bisnis, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
2. Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.
3. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.
4. Penerapan Manajemen talenta ASN dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

5. Perubahan pola pikir dan system kerja yang sebelumnya bersifat hierarki menjadi agile (lincah), fleksibel, dan kolaboratif untuk mewujudkan agile government.
6. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, secara maksimal dan pemberian reward/penghargaan bagi aparatur yang berprestasi.
7. Tindak lanjut atas komitmen bersama dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Penyesuaian system kerja setelah penyederhanaan struktur organisasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan professional.

Upaya Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru yang meliputi :

- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk mewujudkan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit
- Jumlah aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
- Adanya Perda Kelembagaan
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah :

- Pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi

- Daya kreatifitas, keterampilan dan inovasi kerja aparatur
- Kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi
- Terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
- Penguasaan peraturan perundang-undangan

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah :

- Adanya penerapan good governance
- Adanya tuntutan pemberian pelayanan yang semakin berkualitas, transparan, adil, dan bebas dari KKN
- Adanya komitmen pimpinan daerah akan pelayanan yang lebih baik
- Pengembangan teknologi dan informasi
- Dukungan kerjasama dari berbagai pihak
- Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan uraian isu-isu penting, permasalahan, tantangan dan peluang, maka dijabarkan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Barru
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Digital guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dampak dari tidak tertanganinya permasalahan dan ketidakpekaan terhadap isu-isu strategis yang telah dirumuskan tersebut, akan dapat menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta capaian program nasional/internasional.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan perubahan alokasi anggaran program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024.

Adapun perubahan pengalokasian anggaran program/kegiatan dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Pokok Tahun 2024 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru tahun 2024 beserta alokasi anggaran diuraikan secara rinci pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2024					PAGU INDIKATIF				PERANGKAT DAERAH
										LOKASI		TARGET KINERJA			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
						SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	DPA	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU RENJA 2024)	PAGU DPA POKOK	PAGU RENJA 2024 SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (PAGU RENJA SETELAH PERUBAHAN - PAGU DPA POKOK)	
1						2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13
5	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN**													
5	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**NILAI MATURITAS SPIP BKPSDM**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**NILAI MATURITAS SPIP BKPSDM**			**3 (Nilai)**	**3 (Nilai)**	**3 (Nilai)**	**3.918.486.360**	**3.290.073.528**	**3.105.389.204**	**(184.684.324)**	
							RATA-RATA LAMA PEGAWAI MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		**RATA-RATA LAMA PEGAWAI MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**20 JP**	**20 JP**	**20 JP**	**214.301.040**	**-**	**-**	**0**	
5	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan**			**100%**	**100%**	**100%**	**3.253.794.735**	**3.039.589.828**	**2.651.629.504**	**(387.960.324)**	
5	03	01	2	02	0002	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Barru	Kab. Barru	34 orang/bulan	31 Orang/Bulan	28 orang/bulan	3.253.794.735	3.039.589.828	2.651.629.504	(387.960.324)	

5	**0 3**	**0 1**	**2**	**0 5**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM**	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM**			**100%**	**0%**	**0%**	**214.301.040**	-	-	0	
5	0 3	0 1	2	0 5	00 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Barru dan luar Kab	Kab. Barru dan luar Kab	34 orang	0	0	214.301.040	-	-	0	
5	**0 3**	**0 1**	**2**	**0 6**		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun**	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun**			**100%**	**100%**	**100%**	**265.087.500**	**183.319.700**	**333.395.700**	**150.076.000**	
5	0 3	0 1	2	0 6	00 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Barru	Kab. Barru	3 paket	2 Paket	2 paket	6.640.000	640.000	640.000	0	
5	0 3	0 1	2	0 6	00 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Barru	Kab. Barru	3 paket	2 Paket	2 paket	19.025.000	8.277.500	8.077.500	(200.000)	
5	0 3	0 1	2	0 6	00 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Barru dan luar Kab	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	6 Laporan	6 laporan	239.422.500	174.402.200	324.678.200	150.276.000	
5	**0 3**	**0 1**	**2**	**0 7**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun**	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun**			**98,30%**	-	**93,18%**	**274.871.625**	-	**53.200.000**	**53.200.000**	
5	0 3	0 1	2	0 7	00 05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Barru	Kab. Barru	7 unit	-	-	200.000.000	-	-	0	

5	0 3	0 1	2	0 7	00 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Barru	Kab. Barru	7 unit	-	5 unit	74.871.625	-	53.200.000	53.200.000	
5	**0 3**	**0 1**	**2**	**0 8**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor**			**100%**	**100%**	**100%**	**85.822.500**	**39.619.000**	**39.619.000**	**0**	
5	0 3	0 1	2	0 8	00 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Barru	Kab. Barru	1 laporan	3 Laporan	3 laporan	85.822.500	39.619.000	39.619.000	0	
5	**0 3**	**0 1**	**2**	**0 9**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun**			**14,90%**	**14,90%**	**10,59%**	**38.910.000**	**27.545.000**	**27.545.000**	**0**	
5	0 3	0 1	2	0 9	00 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Barru	Kab. Barru	20 unit	18 Unit	18 unit	32.010.000	24.095.000	24.095.000	0	
5	0 3	0 1	2	0 9	00 10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Barru	Kab. Barru	18 unit	9 Unit	9 unit	6.900.000	3.450.000	3.450.000	0	

5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) MANAJEMEN ASN**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) MANAJEMEN ASN**			**Kategori B (61-80)**	**KATEGORI B (61-80)**	**Kategori B (61-80)**	**1.921.928.050**	**869.143.900**	**1.141.720.900**	**272.577.000**	
5	**03**	**02**	**2**	**01**		**Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik**	**Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik**			**58,97%**	**58.97%**	**58,97%**	**661.927.800**	**291.105.000**	**291.105.000**	**0**	
5	03	02	2	01	0002	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Barru	Kab. Barru	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	69.790.000	3.421.400	3.421.400	0	
5	03	02	2	01	0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Barru	Kab. Barru	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	311.543.750	150.785.700	150.785.700	0	
5	03	02	2	01	0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Barru	Kab. Barru	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	49.512.050	64.588.900	64.588.900	0	
5	03	02	2	01	0008	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Barru	Kab. Barru	2 lembaga	2 Lembaga	1 lembaga	13.162.000	10.598.900	10.598.900	0	
5	03	02	2	01	0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Barru	Kab. Barru	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	159.590.000	44.658.700	44.658.700	0	

5	03	02	2	01	0011	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Kab. Barru	Kab. Barru	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	58.330.000	17.051.400	17.051.400	0	
5	**03**	**02**	**2**	**02**		**Mutasi dan promosi ASN**	**Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan**	**Mutasi dan promosi ASN**	**Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan**			**100%**	**100%**	**100%**	**891.037.400**	**532.165.700**	**804.742.700**	**272.577.000**	
5	03	02	2	02	0001	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Kab. Barru	Kab. Barru	5 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	89.427.850	65.512.000	70.698.500	5.186.500	
5	03	02	2	02	0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Barru	Kab. Barru	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	139.675.500	64.615.700	47.140.700	(17.475.000)	
5	03	02	2	02	0003	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Barru	Kab. Barru	1 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	661.934.050	402.038.000	686.903.500	284.865.500	
5	**03**	**02**	**2**	**03**		**Pengembangan kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3**	**Pengembangan kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3**			**80,40%**	**80,40%**	**80,40%**	**174.645.000**	**9.637.000**	**9.637.000**	**0**	
5	03	02	2	03	0004	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Kab. Barru	Kab. Barru	56 orang	20 Orang	20 orang	174.645.000	9.637.000	9.637.000	0	
5	**03**	**02**	**2**	**04**		**Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik**	**Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik**			**91,12%**	**91,12%**	**91,12%**	**194.317.850**	**36.236.200**	**36.236.200**	**0**	

5	03	02	2	04	0002	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Barru	Kab. Barru	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	47.605.250	12.719.000	12.719.000	0	
5	03	02	2	04	0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Kab. Barru	Kab. Barru	206 orang	109 Orang	109 orang	73.894.000	11.977.100	11.977.100	0	
5	03	02	2	04	0007	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kab. Barru	Kab. Barru	7 orang	7 Orang	7 orang	72.818.600	11.540.100	11.540.100	0	
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PERSENTASE PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 20 JP PERTAHUN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PERSENTASE PNS YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 20 JP PERTAHUN**			**80%**	**80%**	**80%**	**976.854.500**	**69.946.000**	**69.946.000**	**0**	
5	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik**	**Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik**			**100%**	**100%**	**100%**	**976.854.500**	**69.946.000**	**69.946.000**	**0**	
5	04	02	2	02	0007	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Kab. Barru dan luar Kab	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	2 Laporan	2 laporan	976.854.500	69.946.000	69.946.000	0	
JUMLAH															**7.031.569.950**	**4.229.163.428**	**4.317.056.104**	**87.892.676**	

BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Evaluasi hasil pelaksanaan dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan RKPD Perubahan. Program dan Kegiatan yang tidak diakomodir dalam Renja Pokok, namun menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia pada Tahun 2024 maka dimasukkan ke dalam kegiatan dengan skala prioritas. Terhadap ketidaksesuaian anggaran antara rencana kerja dan pagu anggaran yang diberikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mengacu pada skala prioritas.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RKPD. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan serta sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru berkewajiban membuat dan memiliki rencana kerja perubahan tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Perubahan 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.
2. Rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru tahun 2024 merupakan

dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024 untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 yang ditetapkan melalui Perda APBD.

3. Dalam rangka peningkatan efektivitas rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru tahun 2024, maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Barru berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan maupun kesesuaian dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan renja tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Barru, Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Barru

SYAMSIR, S.Ip, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197001011990031012